

**ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN PENCATATAN DAN PENYAJIAN
PENDAPATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGGAI LAUT***ANALYSIS OF RECOGNITION, MEASUREMENT, RECORDING AND PRESENTATION OF
REVENUE AT THE REGIONAL GENERAL HOSPITAL OF BANGGAI LAUT*

Oleh:

Angelika Lourensia Thiono¹**Jantje Janny Tinangon²****Christian Victor Datu³**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹angelikathiono22@gmail.com²jantjetinangon447@unsrat.ac.id³Itho.cd@unsrat.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian pendapatan pada RSUD Banggai Laut, serta dapat mengetahui kesesuaian RSUD Banggai Laut dalam menerapkan perlakuan pendapatannya, yaitu pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian pendapatan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 12 (PSAP 12). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD Banggai Laut dalam mengakui, mencatat dan menyajikan pendapatannya, sudah sesuai dengan PSAP 12. Namun dalam mengukur pendapatan terdapat perbedaan karena adanya proses penyesuaian biaya yang ditambahkan, yaitu beban penyisihan piutang dan beban operasional BOS.

Kata Kunci: Pendapatan, Pengakuan Pendapatan, Pengukuran Pendapatan, Pencatatan Pendapatan, Penyajian Pendapatan.

Abstract: This research is intended to determine the recognition, measurement, recording and presentation of income at Banggai Laut Hospital, as well as to determine the suitability of Banggai Laut Regional Hospital in implementing its income treatment, namely recognition, measurement, recording and presentation of income in accordance with Government Accounting Standards Statement Number 12 (PSAP 12). This research is a qualitative descriptive research. Data was obtained from observation, interviews and documentation. The data analysis methods in this research are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that Banggai Laut Hospital recognizes, records and presents its income in accordance with PSAP 12. However, in measuring income there are differences due to the additional cost adjustment process, namely the allowance for receivables and BOS operational costs.

Keywords: Revenue, Revenue Recognition, Revenue Measurement, Revenue Recording, Revenue Presentation.

PENDAHALUAN**Latar Belakang**

Laporan operasional menunjukkan analisis sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan ekuitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan bahwa peristiwa atau transaksi harus dicatat pada periode terjadinya. Ini berbeda dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa peristiwa atau transaksi hanya dapat dicatat apabila kas telah diterima atau dibayarkan.

Sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan operasional akan dibuat berdasarkan pencatatan transaksi ini. Analisis pengakuan, pengukuran pencatatan dan penyajian pendapatn sangat penting karena melibatkan elemen keuangan yang menunjukkan kesehatan finansial rumah sakit dan kredibilitas laporan

keuangan kepada pihak terkait. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 akan membantu Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya serta kepatuhan terhadap peraturan akuntansi.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi pedoman penting bagi rumah sakit dalam mengakui, mengukur, mencatat dan menyajikan pendapatannya.

Penggunaan sistem akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah sering menghadapi masalah dalam mengubah proses dan sistem akuntansinya seperti pendapatan diakui sebelum diterima, hal ini dapat menyebabkan pendapatan yang tercatat melebihi pendapatan yang sebenarnya diterima, pendapatan diakui tidak sesuai dengan standar akuntansi, hal ini dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan, kemudian adanya sistem akuntansi yang manual dan tidak terintegrasi, hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan meningkatkan risiko kesalahan, dan kurangnya pelatihan akuntansi bagi staf, hal ini dapat menyebabkan praktik akuntansi yang tidak sesuai dengan standar.

Tarif jasa RSUD umumnya ditetapkan oleh pemerintah daerah dan tidak selalu mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan rumah sakit dalam menyediakan layanan kesehatan. Hal ini menyebabkan RSUD mengalami kekurangan dana, yang dapat berakibat pada penurunan kualitas layanan dan keterbatasan akses bagi masyarakat. Tarif yang tidak seragam di antara RSUD di berbagai daerah dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pasien. Pasien di daerah dengan tarif tinggi mungkin kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan, sedangkan pasien di daerah dengan tarif rendah mungkin mendapatkan layanan yang berkualitas lebih rendah.

Penetapan tarif yang tidak tepat dapat mendorong inefisiensi dalam pengelolaan keuangan RSUD. Rumah sakit mungkin tergoda untuk meningkatkan pendapatan dengan cara yang tidak tepat, seperti menaikkan harga obat-obatan atau melakukan tes yang tidak perlu. Proses penetapan tarif jasa RSUD seringkali tidak transparan, sehingga masyarakat tidak mengetahui dasar perhitungan tarif dan bagaimana tarif tersebut digunakan. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap RSUD.

Tujuan Penelitian

Berasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengakuan, Pengukuran Pencatatan dan Penyajian Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso (2022:1) dalam *intermediate Accounting* Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para pengguna informasi tersebut. Dalam konteks ini akuntansi tidak hanya mencatat transaksi keuangan tetapi juga menginterpretasikan dan menyajikan informasi tersebut dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti investor, manajer, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan

Pengakuan Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pengakuan Pendapatan. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut. Pengakuan pendapatan yaitu sebuah transaksi yang harus diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan. Pada PSAK 23 dinyatakan jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. (Susilawati, Lusiawan, A. T. N, 2024)

Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan Laporan Operasional diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada. (Karunia, R.L, Maburur A, 2022 : 106). Berdasarkan asas bruto

Pengukuran pendapatan-LO dapat dilakukan, yaitu sebuah prinsip/aturan yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Sebagaimana tercantum dalam PP.71 tahun 2010 yang menjelaskan bahwa berdasarkan asaz bruto Akuntansi Pendapatan-LO dapat dilaksanakan, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (Setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)”. (Rumagit, F. C, Mawikere L. M, 2023)

Pencatatan Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pencatatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Format Pencatatan Laporan Operasional

Pemerintah Pusat Laporan Operasional

(Dalam rupiah)

No	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/Pe nurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1.	<u>PENDAPATAN</u>				
2.	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3.	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xxx	xxx
4.	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xxx	xxx
5.	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
6.	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
7.	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xxx	xxx
8.	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xxx	xxx
9.	Pendapatan Ekspor	xxx	xxx	xxx	xxx
10.	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
11.	Jumlah Pendapatan Perpajakan	xxx	xxx	xxx	xxx
12.					
13.	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14.	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
15.	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xxx	xxx
16.	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
17.	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
18.					
19.	PENDAPATAN HIBAH				
20.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
21.	Jumlah Pendapatan Hibah (20)	xxx	xxx	xxx	xxx
22.	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
23.					
24.	<u>BEBAN</u>				
25.	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
26.	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
27.	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
28.	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
29.	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
30.	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
31.	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
32.	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
33.	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
34.	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx

35.	Bebabn Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
36.	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
37.	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
38.					
39.	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
40.					
41.	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
42.	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
43.	Surplus Penyalasaina Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
44.	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
45.	Defisit Penyalasaina Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
46.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
47.	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
48.	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
49.					
50.	<u>POS LUAR BIASA</u>				
51.	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
52.	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
53.	POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
54.	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 12

Pemerintah Provinsi
Laporan Operasional

(Dalam rupiah)

No	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/Pe nurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1.	<u>PENDAPATAN</u>				
2.	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3.	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4.	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8.					
9.	PENDAPATAN TRANSFER				
10.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PEMBANGUNAN				
11.	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13.	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14.	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15.	Jumlah Pendapaatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
16.					
17.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18.	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19.	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20.	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21.	Jumlah Pendapatan Transfer				
22.					
23.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
25.	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
26.	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
27.	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
28.	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
29.					
30.	<u>BEBAN</u>				
31.	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
32.	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
33.	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx

34.	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
35.	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
36.	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
37.	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
38.	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
39.	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
40.	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
41.	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
42.	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
43.	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
44.	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
45.					
46.	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
47.	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
48.	Surplus Penjualan Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
49.	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
50.	Defisit Penjualan Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
51.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
52.	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
53.	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
54.					
55.	<u>POS LUAR BIASA</u>				
56.	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
57.	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
58.	POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
59.	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 12

Pemerintah Kabupaten/Kota
Laporan Operasional

(Dalam rupiah)

No	Uraian	20x1	20x0	Kenaikan/Pe- nurunan	(%)
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
1.	<u>PENDAPATAN</u>				
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3.	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4.	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8.					
9.	PENDAPATAN TRANSFER				
10.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PEMBANGUNAN	xxx	xxx	xxx	xxx
11.	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13.	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14.	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15.	Jumlah Pendapaatan Transfer Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
16.					
17.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18.	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19.	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20.	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
21.					
22.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
24.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25.	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
26.	Jumlah Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
27.					

28.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
29.	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
30.	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
31.	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
32.	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
33.	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
34.					
35.	<u>BEBAN</u>				
36.	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
37.	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
38.	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
39.	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
40.	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
41.	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
42.	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
43.	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
44.	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
45.	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
46.	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
47.	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
48.	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
49.					
50.	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
51.					
52.	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</u>				
53.	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
54.	Surplus Penyalina Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
55.	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
56.	Defisit Penyalina Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
57.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
58.	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
59.	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
60.					
61.	<u>POS LUAR BIASA</u>				
62.	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
63.	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
64.	POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
65.	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, PSAP Nomor 12

Penyajian Pendapatan

Penyajian Pendapatan Laporan Operasional disajikan dalam Laporan Operasional seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Penyajian pendapatan merupakan faktor penting dari pelaporan keuangan yang harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi untuk memastikan transparansi dan keakuratannya. Metode penyajian pendapatan disajikan dalam laporan keuangan. (Susilawati, Lusiawan, A. T. N, 2024)

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Enjelina Bawuna, Dr. Jantje J. Tinangon, Dhullo Afandi (2022) tentang Implementasi Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Berbasis Akrua. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Implementasi pengakuan pendapatan dan beban pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Pengakuan pendapatan dan beban sudah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Natasya Paturusi, Herman Karamoy, Sonny Pangerapan (2022) tentang

Analisis Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pada Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Lain-lain pendapatan yang sah sudah dilakukan dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai PP No. 71 Tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:429) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian menggunakan data kualitatif dimana data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer berupa data hasil wawancara langsung yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Abdussamad, H. Z 2021:142).

Metode Pengumpulan Data

Metode Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman. (Abdussamad, H. Z 2021).

Metode dan Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan. Proses analisis data, yaitu :

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap dimana peneliti melakukan pengumpulan data mentah dari hasil penelitian wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi data. Reduksi data adalah peneliti melakukan proses memilih, merangkum, mengambil data dasar yang penting berdasarkan topik penelitian dan membuat klasifikasi untuk memudahkan penarikan kesimpulan.
3. Penyajian data. Penyajian data dilakukan sedemikian rupa sehingga data yang disingkat dapat tersusun dengan baik sehingga membantu peneliti untuk mudah memahami data penelitian.
4. Pembahasan. Pada tahap ini tahap di mana peneliti memberikan makna dan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Ini adalah proses yang kreatif dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap teori, konsep, dan konteks penelitian.
5. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dari analisis data. Proses penarikan kesimpulan dapat dilihat dari reduksi data dan penyajian data yang telah disusun sebelumnya, hingga terdapat penarikan kesimpulan dari hasil rumusan masalah penelitian.

Hasil Penelitian**Pengakuan Pendapatan dari Pelayanan Jasa Kesehatan**

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan kedua sebagai Staf Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut, menjelaskan bahwa:

Pendapatan hanya diakui ketika kewajiban utama penyedia layanan kesehatan, yaitu memberikan pelayanan medis kepada pasien, telah dipenuhi sepenuhnya. Ini berlaku untuk dua jenis layanan utama:

1. Pelayanan Kesehatan BPJS
2. Pelayanan Kesehatan Umum

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan di sektor pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan prinsip akrual, dimana pendapatan hanya diakui setelah layanan kesehatan telah diberikan sepenuhnya kepada pasien. Ini berarti, baik dalam konteks layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS maupun layanan kesehatan umum yang dibayar secara langsung oleh pasien, pendapatan tidak diakui pada saat pendaftaran, penerimaan uang muka, atau saat janji temu dibuat. Pengakuan ini memastikan bahwa pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan layanan yang telah diberikan, sehingga memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan penyedia layanan kesehatan. Pendekatan ini juga sesuai dengan standar akuntansi yang menekankan pengakuan pendapatan berdasarkan realisasi atau penyelesaian kewajiban untuk memberikan layanan.

Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan ketiga sebagai Staf UPT Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut, menjelaskan bahwa:

Bahwa proses pengakuan pendapatan tidak hanya bergantung pada pencatatan transaksi, tetapi juga pada realisasi aktual dari pendapatan tersebut. Dengan kata lain, pendapatan dianggap sah dan diakui secara resmi dalam laporan keuangan ketika uang atau nilai yang setara telah diterima, memastikan bahwa laporan pendapatan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kinerja keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Proses ini menekankan bahwa pengakuan pendapatan tidak hanya terjadi pada saat terjadinya transaksi, tetapi lebih penting lagi, saat pendapatan tersebut telah direalisasikan secara nyata.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendapatan tidak hanya dicatat, tetapi juga harus diakui pada saat realisasi. Realisasi di sini berarti bahwa pendapatan tersebut benar-benar telah diterima, baik dalam bentuk uang tunai atau aset lainnya, atau setidaknya ada kepastian yang kuat bahwa pendapatan tersebut akan diterima. Dengan kata lain, meskipun transaksi sudah terjadi, pendapatan baru diakui ketika manfaat ekonomis yang terkait telah direalisasikan atau sangat mungkin direalisasikan.

Pengukuran Pendapatan Laporan Operasional

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan kedua sebagai Staf Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut, menjelaskan bahwa:

Mengukur pendapatan operasional, adalah dengan menghitung semua beban biaya dan menyesuaikannya dengan jumlah pendapatan yang diperoleh. Dengan kata lain, penghitungan ini melibatkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang dihasilkan untuk memperoleh gambaran akurat tentang keuntungan atau kerugian operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses pengukuran pendapatan mencakup evaluasi dan perhitungan biaya yang dikeluarkan serta membandingkannya dengan pendapatan yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kinerja operasional.

Pencatatan Pendapatan Laporan Operasional

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan pertama sebagai Kasubag Keuangan dan Aset Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut, menjelaskan bahwa:

Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut menggunakan basis akrual dalam pencatatan laporan operasionalnya. Ini berarti rumah sakit tersebut mencatat transaksi dan peristiwa keuangan pada saat terjadinya, bukan saat uang diterima atau dibayar. Ini memungkinkan pelaporan yang lebih akurat terkait pendapatan dan beban yang sudah terjadi, meskipun transaksi kas mungkin belum terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut menggunakan basis akrual dalam pencatatan laporan operasionalnya. Ini berarti bahwa transaksi keuangan dicatat pada saat terjadinya, terlepas dari kapan uang diterima atau dibayar. Misalnya, pendapatan diakui saat layanan diberikan, bukan saat pembayaran diterima.

Penyajian Pendapatan Laporan Operasional

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan informan pertama sebagai Kasubag Keuangan dan Aset Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut, menjelaskan bahwa:

Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut menyajikan laporan pendapatan operasional dengan cara mengelompokkan pendapatan menurut sumbernya. Pendapatan tersebut dibagi menjadi dua kategori utama:

1. Pendapatan Jasa Pelayanan
2. Pendapatan Lain-lain yang Sah

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyajian pendapatan dengan cara ini memungkinkan rumah sakit untuk memantau dan menganalisis kinerja finansialnya dengan lebih baik. Dengan mengidentifikasi dan memisahkan sumber pendapatan utama dan tambahan, laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai aliran pendapatan yang mendukung operasional rumah sakit, ini juga membantu dalam perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan transparansi laporan keuangan.

Pembahasan

Analisis Pengakuan Pendapatan dari Pelayanan Jasa Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut pendapatan diakui ketika entitas telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam konteks layanan kesehatan, kewajiban ini terpenuhi ketika pasien telah menerima layanan kesehatan yang dijanjikan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengakuan pendapatan diartikan pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Proses pengakuan pendapatan pasien telah menerima hak pelayanan, ini berarti pasien telah menerima perawatan atau layanan medis yang mereka butuhkan. Pengakuan pendapatan baru terjadi setelah proses ini selesai, memastikan bahwa rumah sakit atau fasilitas kesehatan telah memenuhi kewajiban mereka. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengakuan pendapatan dari pelayanan jasa kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu PP 71 Tahun 2010 menekankan penerapan basis akuntansi akrual, di mana pendapatan dicatat saat hak tersebut timbul, bukan saat kas diterima. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara yang menunjukkan bahwa pendapatan diakui setelah hak atas layanan kesehatan terpenuhi.

Analisis Pengakuan Pendapatan Laporan Operasional

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut pengakuan pendapatan laporan operasional diakui ketika sumber-sumber pendapatan telah dicatat dalam laporan pendapatan dan diakui pada saat realisasi. Pengakuan pendapatan merupakan aspek penting dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan operasional. Pendapatan diakui ketika telah tercatat dalam laporan pendapatan dan diakui pada saat realisasi. Ini berarti bahwa pendapatan hanya akan dicatat dalam laporan keuangan jika telah memenuhi kriteria pengakuan. Pengakuan pendapatan Laporan Operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 12 yang menyatakan bahwa pendapatan laporan operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengakuan pendapatan laporan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengakuan pendapatan di mana pendapatan operasional diakui pada saat realisasi dan telah dicatat dalam laporan pendapatan.

Analisis Pengukuran Pendapatan Laporan Operasional

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut mengukur pendapatan laporan operasional dilakukan dengan cara menghitung beban-beban biaya menyesuaikan dengan jumlah pendapatan. Penyesuaian beban biaya dengan pendapatan dalam laporan operasional bertujuan untuk menciptakan laporan yang transparan dan akuntabel. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengukuran pendapatan laporan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut mengenai pengukuran pendapatan laporan operasional dengan cara menghitung beban-beban biaya yang menyesuaikan dengan jumlah pendapatan. Pengelompokkan

berdasarkan jenis beban menurut PSAP No 12, yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Sedangkan pengelompokkan jenis beban di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut, yaitu beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, beban operasional BOS, dan beban transfer. Bentuk penyesuaiannya adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut ada penambahan nama akun, yaitu beban penyisihan piutang dan beban operasional BOS. Beban penyisihan piutang membantu mengantisipasi risiko piutang tak tertagih, sementara beban operasional BOS memastikan dana yang digunakan untuk program pendidikan dicatat dengan jelas.

Analisis Pencatatan Pendapatan Laporan Operasional

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut pencatatan laporan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut, penggunaan basis akrual dalam pencatatan laporan operasional menunjukkan komitmen terhadap akuntansi yang lebih akurat dan transparan. Dengan basis akrual, Rumah sakit mencatat semua pendapatan dan beban yang terjadi, meskipun pembayaran belum dilakukan atau diterima. Ini membantu memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kondisi keuangan rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa laporan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut menggunakan basis akrual dalam pencatatannya PSAP No. 12 mengatur bahwa laporan operasional harus disusun menggunakan basis akrual, di mana pendapatan diakui pada saat diperoleh, dan beban diakui pada saat terjadi. Hal ini sejalan dengan praktik pencatatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut yang menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan operasional mereka.

Analisis Penyajian Pendapatan Laporan Operasional

Dalam laporan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut, penyajian pendapatan dilakukan dengan memisahkan sumber pendapatan berdasarkan jenisnya. Pendekatan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap keseluruhan keuangan rumah sakit, yang memudahkan analisis dan pengambilan keputusan manajerial.

1. Pendapatan Jasa Pelayanan
2. Pendapatan Lain-lain yang Sah

Penyajian Pendapatan Laporan Operasional disajikan dalam Laporan Operasional seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Penyajian pendapatan berdasarkan jenisnya juga berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut. Dengan adanya pemisahan yang jelas antara pendapatan jasa pelayanan dan pendapatan lain-lain yang sah, pihak manajemen rumah sakit dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan audit terhadap aliran keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua sumber pendapatan dicatat dengan benar dan tidak ada kebocoran atau penyalahgunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian pendapatan laporan operasional disajikan menurut jenis sumber pendapatannya sejalan dengan cara Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut yang memisahkan pendapatan jasa pelayanan dan pendapatan lain-lain yang sah. PSAP No. 12 menekankan bahwa pendapatan perlu diklasifikasikan secara jelas untuk mencerminkan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber pendapatan tersebut. Oleh karena itu, pengelompokan pendapatan menjadi pendapatan jasa pelayanan dan pendapatan lain-lain yang sah di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut sudah sesuai dengan ketentuan standar ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari analisis hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pengakuan pendapatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yang mengharuskan penggunaan basis akrual. Artinya, pendapatan dicatat ketika hak untuk menerima pendapatan tersebut timbul, bukan saat kas diterima. Ini memastikan bahwa pendapatan diakui setelah kewajiban rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan terpenuhi.

2. Pengakuan pendapatan dalam laporan operasional diakui ketika sumber-sumber pendapatan telah dicatat dan realisasi pendapatan telah terjadi. Pendapatan diakui berdasarkan prinsip akuntansi akrual, di mana pendapatan dicatat saat diperoleh, meskipun pembayaran belum diterima. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengakuan pendapatan di RSUD Banggai Laut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang pengakuan pendapatan berbasis akrual.
3. Dalam proses pengukuran pendapatan laporan operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut terdapat perbedaan karena adanya proses penyesuaian biaya yang ditambahkan, yaitu beban penyisihan piutang dan beban operasional BOS.
4. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banggai Laut, penerapan basis akrual dalam pencatatan laporan operasional menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akurasi akuntansi. Rumah sakit mencatat pendapatan dan beban secara tepat, meskipun pembayaran belum dilakukan atau diterima. Hal ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi keuangan rumah sakit dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Laut menyajikan pendapatan operasionalnya dengan memisahkan pendapatan berdasarkan jenisnya, yaitu Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Pemisahan ini memberikan kejelasan dalam menganalisis kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap keuangan rumah sakit. PSAP No. 12 yang mengharuskan klasifikasi pendapatan secara jelas berdasarkan sumbernya.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Rumah sakit harus memastikan bahwa staf keuangan memiliki pemahaman yang baik tentang konsep basis akrual, dan melakukan pelatihan mengenai akuntansi berbasis akrual secara berkala untuk menjaga agar proses pengakuan pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk beban penyisihan piutang, RSUD Banggai Laut harus fokus pada penanganan piutang secara proaktif dengan strategi pengelolaan risiko yang efektif. Sedangkan untuk beban operasional, RSUD Banggai Laut perlu mengoptimalkan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengendalian biaya agar tetap menjaga kinerja operasional yang efisien. Kedua aspek ini harus dikelola dengan kebijakan yang terencana dan sistematis untuk memastikan kesehatan keuangan dan kualitas layanan rumah sakit.
3. RSUD Banggai Laut dapat lebih memperhatikan lagi tentang peraturan-peraturan terbaru agar dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Proses. ISBN 978-623-97534-3-6
- Bawuna, E., Tinangon, J., & Affandi, D. (2022). Implementasi Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Berbasis Akrual. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1151-1156.
- Karurnia, R. L, dan Mabrur A. (2022). *Akuntansi Pemerintahan Konsep dan Praktik di Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta
- Kieso 2022. *Akuntansi Keuangan Menengah: Intermediate accounting (jilid 1) (IFRS)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Paturusi, N. (2022). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Dan Penyajian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 1024-1033.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Rumagit, F. C., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pendapata-LO Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara: Evaluation of LO-Revenue Accounting Treatment Based on

Government Accounting Standards (GAS) Government Regulation Number 71 of 2010 concerning the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 7(4), 439-446.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung

Susilawati, S., & Lusiawan, A. T. N. (2024). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Menurut PSAK 72. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 7(1), 29-37.

